

apa ini  
jadi bagian  
dari hipotesis

**BAB IV**  
**MASA DEPAN FORUM SOSIAL DUNIA**

Sejak diselenggarakannya FSD I di Porto Alegre, Brazil, dukungan terhadap gerakan globalisasi alternatif semakin bertambah, baik dari negara berkembang maupun negara maju. Kaum intelektual, aktivis pergerakan dan mantan pemimpin politik dunia bertemu dan berdiskusi dalam forum ini. Popularitas FED semakin terancam oleh perkembangan FSD. Bagi sebagian penggiat FSD, kemajuan tersebut justru menjadi tanggungjawab tersendiri bagi perkembangan FSD kedepan. Pada pertemuan Mumbai, India, permasifan gerakan sosial baru mulai mengemuka. Peran FSD sebagai forum pergerakan globalisasi alternatif memiliki peran penting dalam menghasilkan inovasi-inovasi baru perekonomian dunia.

Fokus gerakan FSD sebagai forum *counter*-globalisme dimantapkan pada dua ranah gerakan. *Pertama*, gerakan vertikal; FSD vis a vis FED, lembaga penunjang globalisme seperti IMF, WTO, *World Bank*, dan korporasi global. Gerakan ini dimasifkan melalui penggalangan aksi-aksi demonstrasi pada setiap penyelenggaraan forum global. *Kedua*, gerakan horisontal; pembentukan jaringan melalui pembantuan forum sosial regional dan penguatan masyarakat sipil global melalui propaganda media dan pemasifan isu pada tingkatan lokal oleh organisasi non pemerintah yang terlibat dalam FSD. Dua ranah gerak inilah yang kemudian menjadi penentu utama signifikansi peran FSD dan menjadi arah pergerakan FSD kedepan.

### **A. Forum Sosial Dunia vis a vis Forum Ekonomi Dunia**

Konstelasi ekonomi politik internasional pada abad ke 21 diwarnai oleh dua model globalisasi yang di representasikan oleh dua forum yang berbeda namun pada waktu bersamaan, Forum Ekonomi Dunia di Davos Swiss dan Forum Sosial Dunia di Porto Alegre Brazil. Forum pertama adalah globalisasi neoliberal sedangkan forum kedua adalah globalisasi alternatif yang berlandaskan pada solidaritas sosial dan demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat lebih langsung.

Dua kekuatan besar globalisasi ini, mengklaim berada dalam posisi yang benar. Forum Ekonomi Dunia di dukung oleh para pemimpin politik dan penguasa ekonomi dunia sedangkan FSD justru merupakan kekuatan massa rakyat yang tidak memiliki kekuatan politik maupun modal yang memadai. Sejak pelaksanaan FSD I di Porto Alegre tahun 2001 sampai dengan FSD V di Porto Alegre, pemimpin dunia di FED menyadari akan ancaman kekuatan baru gelombang perlawanan terhadap globalisasi neoliberal yang selama ini menghegemoni dunia. *Free trade* yang telah dikampanyekan keseluruh dunia mendapat tentangan dari gerakan sosial dengan menghadirkan globalisasi alternatif. Kekuatan baru masyarakat dalam Forum Sosial dunia kini terus berkembang dan merebut wacana dominan politik dunia, tidak hanya di negara-negara dunia ketiga, namun juga di negara maju seperti AS dan Prancis.

## 1. Dua Forum dengan Pendekatan Berbeda

Tujuan dari kedua forum ini sama sekali berbeda. Davos adalah alat untuk memajukan kebijakan neoliberal yang diadopsi tahun 1970-an dan 1980-an oleh pemerintahan Margaret Thatcher di Inggris, Ronald Reagan di Amerika Serikat dan Pinochet di Chile. Di tahun 1990-an kegiatan itu meluas. Inisiatif perdagangan seperti Putaran Uruguay (GATT), yang menjadi dasar dari WTO dan NAFTA sekarang, adalah hasil-hasilnya. Davos adalah simbol dan sumber inspirasi bagi neoliberalisme dogmatik yang mempromosikan pengurangan peran negara, swastanisasi, liberalisasi pasar dan modal, pengurangan pajak bagi orang kaya dan pemotongan pengeluaran sosial. Konferensi Davos dihadiri oleh 3000 delegasi, termasuk CEO dari perusahaan transnasional terbesar seperti Coca Cola, McDonald's, Shell dan Nestlé. Staf tingkat tinggi dari *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank* dan WTO, para politisi terkemuka dunia dan pelaku pasar seperti Bill Gates turut memeriahkan forum ini<sup>1</sup>. Di Davos, wakil-wakil perusahaan transnasional dan sekutunya juga akan membahas tema-tema kunci seperti "Pembentukan Perusahaan Global", "Bioteknologi: Merencanakan Masa Depan", dan "Bagaimana menghadapi reaksi perlawanan terhadap globalisasi".

Sedangkan Forum Sosial Dunia dilaksanakan sebagai hasil kritis terhadap penyimpangan forum Davos. Forum yang pertama kali diselenggarakan pada 15 Januari 2001 di Porto Alegre Brasil ini, diorganisir

---

<sup>1</sup> [http://attac.org/htm/07\\_jan\\_2005](http://attac.org/htm/07_jan_2005)

oleh 90 gerakan sosial dan lembaga serta koalisi 50 lembaga dan organisasi rakyat di Brazil dan berhasil mengumpulkan kalangan aktivis dan pemimpin sosial dari seluruh dunia yang menentang pikiran hegemonik neoliberal.<sup>2</sup>Tujuan diselenggarakannya Forum Sosial Dunia pertama di Porto Alegre Brasil adalah untuk menantang gagasan hegemoni neoliberal berwujud Forum Ekonomi Dunia. Perkembangan masing-masing kedua forum ini akan menentukan arah perkembangan ekonomi dunia pada masa depan.

## 2. *Free Trade* atau *Fair Trade*

Titik utama perbedaan FSD dengan FED terletak pada dua model perdagangan yang masing-masing ditawarkan. Perdagangan bebas *Free Trade* dan perdagangan yang berkeadilan atau *Fair Trade*.

Istilah perdagangan bebas dapat diartikan secara sederhana sebagai perdagangan yang dilandasi mekanisme pasar murni (berdasar pada permintaan dan penawaran), tanpa pengaruh-pengaruh non ekonomi dan pengaruh-pengaruh intervensi regulasi yang menyebabkan eksklusifisme.<sup>3</sup> Pada prinsipnya mekanisme ini telah ada sejak mekanisme perdagangan *laissez Feire* mulai dikenalkan, pada abad ke-19. Pada Pasca PD I, banyak negara-negara besar justru mengisolasi diri dan mengembangkan sistem Autarky dalam perdagangannya. Setelah PDII *Free Trade* dikampanyekan kembali dalam sistem internasional melalui pembentukan GATT pada 1948.

---

<sup>2</sup> *Op cit* hal 2

<sup>3</sup> <http://www.bisnisIndonesia.com>

Pembentukan WTO pada tahun 1994, merupakan tonggak keberhasilan kampanye kaum neoliberal. Bagi kaum neoliberal, perdagangan bebas merupakan justifikasi institusional bagi pemberlakuan prinsip pasar bebas di seluruh dunia.

Hambatan perdagangan yang diciptakan oleh negara tertentu dalam bentuk pemberian tarif baik bagi ekspor maupun impor, penetapan kuota, hambatan administratif, proteksi dan hambatan politis seperti embargo, diskriminasi dan lain sebagainya, adalah hambatan terbesar dalam perdagangan internasional. Seiring dengan perjalanan waktu, teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi mencapai kemajuan pesat begitu pula kebudayaan sehingga memungkinkan interaksi manusia bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, pada titik ini pemujaan terhadap kemandirian negara dipertanyakan.

Pemberlakuan kembali perdagangan bebas diawali dengan pembentukan blok-blok perdagangan dalam satu kawasan, tidak dapat dipungkiri bahwa kedekatan geografis sangat mempengaruhi intensitas dari kebutuhan *complimentary* antar negara sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran yang saling menguntungkan. Tentu saja regulasi kawasan ini sangat peduli pada kesejahteraan rakyat, sehingga mirip dengan perekonomian negara pada masa keynesian, hanya regulasi dibatasi pada point tertentu seperti penetapan tarif sebesar 0% atau 0, yang kemudian berkembang menjadi keseragaman tarif untuk importir asing dan lain sebagainya,

mekanisme perdagangan ini dikenal sebagai *free market area*. AFTA dan APEC adalah contoh nyata dari institusi kerjasama perdagangan regional. AFTA jelas merupakan kerjasama penciptaan blok perdagangan, sedangkan APEC mempunyai kerangka kerjasama yang lebih kompleks lagi yaitu meliputi kerjasama tehnik dan ekonomi<sup>4</sup>.

Perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan (GATT) juga memiliki turunan berikutnya berupa organisasi perdagangan dunia seperti, NAFTA (wilayah perdagangan bebas Amerika Utara), FTAA (wilayah perdagangan bebas Amerika), dan juga perjanjian Maastrich untuk perdagangan bebas Uni Eropa. Pendirian WTO sebagai rezim perdagangan internasional, membawa perubahan yang signifikan terhadap perekonomian dunia. Perjanjian perdagangan bebas antar kawasan mengalami peningkatan yang mengesankan sejak era 1990an. (lihat grafik. III)

Pembentukan WTO sebagai institusi internasional perdagangan bebas dimaksudkan untuk menyempurnakan mekanisme perdagangan yang telah digagas dalam GATT yang menyangkut sekurang-kurangnya tiga aspek penting. *Pertama*, peningkatan komitmen negara-negara anggota untuk mendukung beroperasinya sebuah rezim perdagangan internasional. *Kedua*, peningkatan kapasitas administratif terutama dalam hal penyelesaian konflik

---

<sup>4</sup> <http://korwilpdip.org/1globalisasi200104.htm> - 24k

perdagangan antar negara. *Ketiga*, pemberian wewenang yang lebih besar dalam proses negosiasi perdagangan dalam berbagai forum ekonomi global.<sup>5</sup>

Perdagangan bebas pada prinsipnya mengutamakan tercapainya keuntungan bersama berdasarkan asas keadilan, namun implementasi dilapangan cenderung menguntungkan negara-negara maju dengan korporasi besar yang mereka miliki. WTO sebagai rezim perdagangan bebas dunia, justru menjadi institusi penunjang bagi hegemoni sistem yang negara maju terhadap negara dunia ketiga. Penetapan standar ganda dalam berbagai aktivitas perdagangan anggotanya dengan negara lain, negara-negara maju yang mendukung adanya pemberlakuan *zero tariff* terhadap negara-negara berkembang justru menetapkan tarif impor tertentu di negaranya. Hal ini menyebabkan ketimpangan perdagangan antar utara selatan, disatu sisi negara-negara selatan harus menurunkan tarif impor dari negara utara hingga pada titik yang seminimal mungkin, sementara negara-negara utara justru memberlakukan tarif terhadap produk-produk dari selatan untuk melindungi produk dalam negeri. Isu-isu pencemaran lingkungan juga menjadi sorotan utama bagi dipertanyakannya kembali pemberlakuan perdagangan bebas dalam skala global. Perhatian sektor bisnis terhadap lingkungan hidup sulit diharapkan mengingat motif pencarian keuntungan yang selalu menyertai setiap transaksi perdagangan, apabila peran negara dalam perdagangan bebas

---

<sup>5</sup> Adiwinata, Bob, B, Pakpahan, K, Aknolt, *Fair Trade-Gerakan Perdagangan Alternatif*, Pustaka Pelajar, Oxfam, Pacis Bandung, Cetakan I. Juli 2004

semakin dipersempit maka konservasi terhadap sumber daya alam dalam keberlanjutan lingkungan hiduppun semakin sulit dioptimalkan.

Berbeda dengan *Free trade*, dimana pemujaan yang berlebihan terhadap berlakunya mekanisme pasar dan persaingan sempurna diantara kapitalis, maka *Fair Trade* menawarkan perdagangan yang berkeadilan, dengan mengedepankan kepentingan pengusaha kecil dan para petani memperoleh hak nya. Tujuan utama bagi pembentukan *fair trade* adalah terciptanya ruang-ruang bagi keadilan, hak asasi manusia, keberlanjutan unsur; lingkungan, toleransi dan demokrasi dalam perdagangan. Perdagangan interrnasional dalam *fair trade* dilakukan secara langsung, dimana produk primer dari pengrajin atau petani dibeli oleh sistem sejenis koperasi untuk kemanusiaan, untuk kemudian disalurkan pada outlet khusus di negara-negara maju, dengan demikian harga jual petani bisa lebih tinggi dengan dihindarinya mekanisme distribusi orang per orang. Gagasan *fair trade* meskipun tidak sepopuler *free trade*, namun gagasan ini paling tidak dapat mejadi alternatif bagi perdagangan internasional kedepan.

Aktor-aktor yang dalam *Fair Trade* adalah para aktivis pergerakan dan NGO's, mereka berperan sebagai distributor barang-barang produksi petani dan pengusaha kecil dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju. Masih minimnya dukungan pemerintah, merupakan tantangan bagi perkembangan mekanisme perdagangan berkeadilan.

### 3. Delegitimasi Forum Ekonomi Dunia

Pada awal kemunculannya Forum Ekonomi Dunia didirikan dari adanya semangat karikatif negara-negara besar dan elite ekonomi dunia sebagai sponsor utama globalisasi untuk menolong ketertinggalan negara-negara Dunia Ketiga. Lembaga-lembaga internasional seperti ILO, Bank Dunia, IMF dibentuk dengan semangat filantropis itu.<sup>6</sup> Forum Davos pada prinsipnya bertujuan sebagai wahana tukar pikiran di antara tokoh-tokoh ekonomi, politik, dan sosial dunia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kehadiran pemilik modal dan pemimpin politik dunia, idealnya keberadaan forum ini, cukup signifikan sebagai wadah strategis bagi pemecahan masalah global. Namun kritik dan protes yang berkembang belakangan justru membuktikan lain. Dominasi pemilik modal dan negara-negara utara dalam pengambilan keputusan FED, menyebabkan arah globalisasi ditentukan secara sepihak oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan terhadap dunia, sangatlah ironis ketika nasib ratusan juta masyarakat dunia hanya ditentukan oleh mereka yang justru memiliki kepentingan besar terhadap eksploitasi umat manusia dan alam tanpa mengindahkan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi. Semangat tujuan forum sebagai tempat perundingan ragam permasalahan dunia, baik sosial, politik, pertahanan keamanan, belakangan diselewengkan

---

<sup>6</sup> <http://www.kompas.co.id/cetak/0401/21/opini/813322.htm>

oleh kepentingan para CEO korporasi besar seperti Nestle' dan Microsof, kini forum Davos lebih banyak menjadi ajang pertemuan di antara para ekonom dunia, atau lebih tepatnya lagi, di antara para pelaku ekonomi negara-negara industri maju, para menteri perdagangan bertemu dan berunding dengan WTO disela-sela berjalannya forum, negosiasi dan kesepakatan dagang antar perusahaan lebih banyak dilakukan di forum ini.

Negara-negara besar seperti AS menggunakan kesempatan mengkampanyekan kepentingan perusahaannya di Irak dengan dalih perang melawan terrorisme. Dalam slogannya "There is no prosperity without security" wakil presiden AS Dick Cheney dalam pertemuan Davos 2004 mengklaim keterlibatan militer AS dalam rekonstruksi Irak sebagai upaya terpuji menuju kemakmuran Irak.

Forum Ekonomi Dunia tidak dapat dikatakan sebagai representasi global, karena yang hadir dalam forum tersebut adalah mereka yang tidak memiliki komitmen terhadap kemajuan bersama, kepedulian mereka terhadap peperangan dan kemiskinan, hanya sebatas retorika. Realitas demikian diberbagai belahan dunia masih berlangsung bahkan semakin parah, padahal Forum Ekonomi Dunia telah dilaksanakan selama 30 tahun lebih. Ironisnya dari konferensi-konferensi inilah kemudian lahir konsep globalisasi ekonomi dunia, dan rekomendasi penting bagi kinerja aktor-aktor globalisasi dan kebijakan negara

Tidak dapat dipungkiri Forum Ekonomi Dunia menjadi ajang pemaksaan agenda globalisme terhadap dunia ketiga melalui hegemoni pemikiran dan pengkaburan realitas globalisasi yang sebenarnya. Doktrin pemikiran neoliberalisme yang didengungkan dalam forum Davos, dalam perjalanannya mengalami krisis legitimasi. Dalam ideologi neoliberal "satunya tanggung jawab bisnis adalah memupuk laba sebanyak-banyaknya", demikian Friedman, sang guru ekonomi yang banyak dirujuk kapitalis modern saat ini berkomentar. Jadi bukanlah kemakmuran dunia yang ingin dicapai melainkan kemakmuran korporasi dan AS.

Fakta lain adanya penyimpanan pemikiran neoliberal terhadap semangat filantropisnya menyelamatkan dunia, adalah dipublikasikannya MAI (*Multilateral Agreement on Investments*) pada tahun 1998, sebuah proposal perjanjian multilateral tentang investasi yang sebelumnya secara rahasia dipersiapkan dalam pertemuan tertutup Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization for Economic and Development / OECD*), nama lain dari persekutuan ekonomi negara-negara dunia pertama. Proposal ini akan ditandatangani oleh negara-negara maju yang pelaksanaannya akan dipaksakan kepada dunia ketiga. Publikasi proposal ini menimbulkan keyakinan, bahwa realitas globalisasi dewasa ini merupakan agenda lanjutan dari kapitalisme global dan bukanlah agenda kemanusiaan. Gambaran yang lebih rinci sebagaimana alam dituturkan oleh Susan George dalam Lugano Report (1999).

bahwa kini atmosfer pun dikorbankan demi keuntungan jangka pendek dari ekonomi industri BBM; keragaman hayati global berkurang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak enam puluh lima juta tahun yang lalu, seluruh ekosistem dunia dalam bahaya kehancuran. Maka, bahkan kapitalis yang paling cerdas pun harus menyadari bahwa akumulasi laba tanpa tanggung jawab ini tidak bisa diteruskan<sup>7</sup>.

Lebih lanjut dikatakan dalam laporan Lugano Report, bahwa satu-satunya cara yang dapat kita lakukan adalah melawan hegemoni neoliberal dan berikan alternatif terhadap masa depan dunia yang lebih adil.

“..tak ada manfaatnya meminta korporasi transnasional mengurangi praktik itu – maka kita harus melawannya.”<sup>8</sup>

Krisis yang dialami oleh negara-negara dunia ketiga, kolapsnya perekonomian dunia pada periode 1990-an yang dipicu oleh krisis ekonomi terutama di wilayah Asia, demonstrasi besar yang dilakukan oleh masyarakat sipil pada tahun 2000 di Seattle menjadi bukti nyata bahwa lembaga lembaga penyanggah kapitalisme dunia; WTO, IMF, World Bank tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, juga menjadi pemicu timbulnya perlawanan terhadap keberadaan FED. Ketika konferensi Davos mulai menunjukkan gejala penyimpangan, protes dan kritik terhadap forum tidak dapat dihindari. Warga Swiss melakukan protes dengan menggelar Demonstrasi besar-besaran diluar forum, pada era 1990an kelompok penentang Davos bergabung dalam sebuah forum “The other-Davos” di Zurich. Pertemuan yang dikoordinir oleh sebuah LSM yang menamakan diri

---

<sup>7</sup> [yanmar-n@unisosdem.org](mailto:yanmar-n@unisosdem.org) internasional / sosial kemasyarakatan / news report>

<sup>8</sup> [Jakarta.indymedia.org/newswire.php?story\\_id=96](http://Jakarta.indymedia.org/newswire.php?story_id=96)

ATTAC Switzerland menggelar konferensi sehari yang dihadiri oleh kurang lebih 1000 orang dan mewakili 50 organisasi pergerakan anti globalisasi dari seluruh dunia.

Disamping serangkaian demonstrasi dan pertemuan anti-Davos, kritikan juga dilancarkan oleh beberapa pemimpin politik yang melihat penyimpangan arah Davos, sebut saja sekjen PBB Koffi Annan yang juga pernah menghadiri FED "pemberantasan kemiskinan dan perkembangan internasional harus kembali menjadi tema terpenting dalam forum ini. bahkan tokoh pendiri FED Profesor Klaus Schwab menutup pertemuan Davos 2005 dengan memperingatkan anggota forum untuk menjalankan tanggungjawab pribadi, tanggungjawab global dan tanggungjawab bagi generasi selanjutnya<sup>9</sup>.

Tokoh dunia lainnya yang mempermasalahkan keberadaan forum ini datang dari kalangan kaum intelektual pemerhati globalisasi. Sebagai contoh, di bulan Desember 1997, Ignacio Ramonet, editor majalah *Le Monde Diplomatique*, menulis sebuah makalah berjudul "Melucuti Pasar". Isinya tentang tirani kekuasaan pasar finansial yang ia anggap semakin mempermainkan nasib mayoritas warga dunia. Ramonet mengakhiri tajuknya dengan seruan bagi pembentukan asosiasi-asosiasi rakyat untuk mengoreksi tirani finansial itu. Seruan Ramonet itu mendapatkan sambutan dari sejumlah kalangan dunia. Pada tahun 2000, seruan itu menjadi kongkret setelah dua warga Brasil bernama Oded Grajew dan Chico Whitaker yang baru datang

---

<sup>9</sup> [http://www. Bisnis indonesia.com](http://www.Bisnis indonesia.com)

dari Konferensi Davos menyaksikan bagaimana masa depan dunia didikte para tuan besar finansial. Keduanya menyambut seruan Ramonet itu dengan menyelenggarakan semacam konferensi “tandingan” atas konferensi Davos. Maka lahirlah, Forum Sosial Dunia yang tiap tahunnya menyelenggarakan konferensi serupa pada saat yang bersamaan di kota Porto Alegre, Brasil.

Nampaknya keprihatinan terhadap forum Davos dapat dimengerti, mengingat FED adalah cerminan kapitalis global dengan segala kemewahan dan kediktatorannya. Pembiayaan forum oleh anggota korporat yang terbilang cukup mahal, umumnya perusahaan multinasional yang memiliki penghasilan tahunan US \$ 1 miliar menyumbang lebih dari 30000 Franc Swiss atau sekitar US\$ 23.893 dn 14000 bagi setiap karyawan yang dikirimkan ke Davos. Sementara di belahan dunia lain lebih dari 1 miliar manusia hanya mengkonsumsi US \$1 sehari, tanpa sanitasi dan layanan kesehatan. Sementara itu agenda demokratisasi yang terkesan dipaksakan bagi negara berkembang justru gagal dimaknai sepenuhnya oleh FED.

#### **B. Porto Alegre menuju Davos: Alternatif Globalisasi Untuk Dunia**

Penyelenggaraan FSD 2001, merupakan manifestasi penguatan perlawanan dunia. Sejak saat itu, Konferensi Davos selalu dibayang-bayangi berbagai isu yang keluar atau mungkin keluar dari Forum Sosial Dunia. Di forum-forum internal konferensi kini mulai mengemuka wacana evaluasi terhadap proses

globalisasi dunia, sebuah tema yang sebelumnya selalu menjadi *icon* penyelenggaraan konferensi Davos.

Demikian juga dengan konferensi tahun ini. Presiden Perancis, Jacques Chirac, menyatakan akan datang ke konferensi untuk menyampaikan usulan tentang pentingnya penarikan pajak dari bursa-bursa efek dunia, dana ini kemudian disalurkan untuk membantu negara-negara miskin. Secara tegas, Chirac mengatakan bahwa usulannya dalam rangka evaluasi atas proses globalisasi dunia. Langkah Chirac ini sejak awal sudah dikecam oleh Presiden AS George W. Bush. Dalam paradigma unilateral AS, sikap tidak mendukung globalisasi dunia sama saja dengan sikap anti AS. Kekhawatiran perang di Iraq membayangi semua topik di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, tahun 2003 di mana 2.300 peserta hadir dari 104 negara, meskipun desakan AS untuk melakukan tindakan militer terhadap Iraq mendominasi perundingan. Pada pembukaan forum, PM Malaysia Mahathir Mohamad mengemukakan perang di Iraq hanya akan merupakan ajang pelepasan dendam dan pembalasan. Menlu AS Colin Powell dijadwalkan berpidato di forum ini hari Minggu<sup>10</sup>

Menyikapi perkembangan FSD, para pemimpin dunia yang tergabung dalam FED berencana mengundang partisipasi aktivis FSD untuk berbicara dalam penyelenggaraan Forum Ekonomi Dunia, hal ini menunjukkan posisi FSD sebagai media alternatif sangat diperhitungkan oleh FED dan keberadaannya mengancam

---

<sup>10</sup> <http://www.voanews.com/indonesian/Archive/a-2003-01-24-4-1.cfm>/27 april 2005

keberlangsungan forum selanjutnya, oleh karenanya perlu dibangun ruang dialog antara kedua forum. Namun “lampu hijau” yang diberikan para punggawa kapitalis tersebut bagi para aktivis FSD perlu diwaspadai, disinyalir keinginan tersebut hanyalah strategi pemecahan FSD. Disamping itu tujuan FSD tidak hanya mendapatkan hak suara dan pengakuan FED, akan tetapi bagaimana mencari alternatif bagi pembentukan sistem yang lebih adil bagi masa depan dunia.

Sumber laporan lain mengemukakan kepedulian dunia terhadap kemiskinan di Afrika harus menjadi perhatian penting dalam pembahasan Forum Ekonomi Dunia 2005.

Perdana Menteri Inggris Tony Blair memberitahu Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, bahwa ketidak-acuhan terhadap kemiskinan di Afrika memalukan. Pada hari kedua konferensi itu, Blair hari Kamis mengatakan jika bagian-bagian lain di dunia ini mengalami kemiskinan kronis seperti di Afrika, dunia internasional akan marah. Mantan Presiden Amerika Bill Clinton, mengatakan dalam forum itu bahwa menggandakan bantuan ke Afrika murah jika dibandingkan dengan 80 milyar dolar yang dihabiskan Amerika dalam satu tahun saja untuk perang Irak. Presiden Nigeria Olusegun Obasanyo dan Presiden Afrika Thabo Mbeki juga berpidato, dengan memohon keringanan hutang lebih jauh bagi Afrika. Bintang rock Irlandia Bono dan milyarder komputer Amerika Bill Gates juga menghadiri konferensi empat hari itu.<sup>11</sup>

Kepedulian pemimpin dunia dalam pertemuan Davos, merupakan keberhasilan FSD setelah berbagai aksi massa yang digalang disela-sela pelaksanaan forum, maupun aksi protes terhadap forum Davos yang semakin berkembang beberapa waktu belakangan.

---

<sup>11</sup> <http://voanews.com/indonesian/Archive/04/05/2005>

Demonstrasi tertib berlangsung disela-sela Forum Ekonomi Dunia 2002, New York. Sekitar seribu orang demonstran meneriakkan slogan-slogan dan melambai-lambaikan poster anti globalisasi, saat peserta pertemuan elit itu mencurahkan perhatian pada perekonomian pasca-11 September yang rapuh. Menteri Keuangan Amerika Paul O'Neill, milyarder Bill Gates dan bintang rock Bono memperdebatkan cara terbaik membantu kaum miskin dunia. Di luar pertemuan yang dikawal ketat itu, dua kelompok terbesar pengunjung rasa adalah dari gerakan keagamaan Falun Gong dan kelompok yang disebut ANSWER, singkatan dari kata-kata dalam bahasa Inggris 'Bertindak Sekarang Untuk Hentikan Perang Dan Akhiri Rasisme'.<sup>12</sup> Pada pertemuan FSD IV di Mumbay India, ribuan massa bergabung dalam aksi menentang kebijakan AS menyerang Irak. Rangkaian demonstrasi serupa kerap kali mewarnai pertemuan dan forum-forum penting dunia, hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan para pemimpin dunia akan ketimpangan dunia yang tengah berlangsung.

Ide utama dari pembentukan forum sosial dunia, adalah kekuatan baru bagi masyarakat yang termarjinalkan. Dalam kaitannya dengan perlawanan terhadap Forum Ekonomi Dunia, setelah lima tahun perjalanan FSD gaung anti Davos semakin bergema. Sistem di dunia kini lebih mengarah ke monopoli-kapitalistik. Hal itu harus diubah. Karena itu, setiap warga dunia yang percaya bahwa *another world is possible*, seperti misi Forum Sosial Dunia, wajib mengupayakan sistem ekonomi yang lebih bersifat partisipatif. Demikian benang

---

<sup>12</sup> Ibid (Demonstrasi Tertib Berlangsung Disela Forum Ekonomi Dunia di New York-03/02/2002)

merah diskusi panel hari keempat tentang globalisasi dan alternatifnya, dalam Forum Sosial Dunia (FSD) IV yang berlangsung di Mumbai, India<sup>13</sup>.

Sistem baru dunia itu juga harus dilandasi oleh solidaritas, diversitas, kesetaraan, dan manajemen yang mandiri. Meskipun diakui implementasinya sungguh tidak mudah, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan agar dunia baru yang lebih adil bisa diwujudkan.

Kini Porto Alegre menjadi harapan bagi mereka yang termarjinalkan untuk mewujudkan dunia baru yang lebih memihak pada hak-hak mereka, Meskipun Forum Davos masih ada, diktator dunia masih menjalankan misi penguasaan dunia, namun perkembangan pesat FSD menjadi kekhawatiran tersendiri bagi FED, pembahasan forum Davos kini mulai melirik apa yang massa rakyat inginkan dan disampaikan dalam FSD.

### **C. Rekonstruksi Strategi Pergerakan**

Seperti halnya forum Davos, perkembangan FSD tidak semulus yang dibayangkan, perbedaan pendapat menyangkut arah gerak dan masa depan forum yang kian mengemuka terutama setelah diadakannya FSD IV Mumbai 2004.

Sebagai forum bagi pergerakan *counter-hegemoni*, FSD selayaknya berkembang menjadi “perjuangan semesta”, yakni perjuangan berdasarkan prinsip dasar keadilan dan kesetaraan, terbebas dari kepentingan ideologis tertentu atau

---

<sup>13</sup> Kompas, 20 Januari 2004

kelas sosial. Hanya ada satu cara melawan hegemoni kaum borjus internasional, yakni, "memobilisasi mayoritas penduduk untuk melawan kapitalisme dan kaum borjus."<sup>14</sup>

Suatu kelas tidak bisa meraih kepemimpinan nasional dan menjadi hegemonik, jika kelas itu hanya membatasi pada kepentingan mereka sendiri; mereka harus memperhatikan tuntutan dan perjuangan rakyat yang tidak mempunyai karakter kelas yang bersifat murni, yakni, yang tidak muncul secara langsung dari hubungan produksi.<sup>15</sup>

Pergerakan seperti kesetaraan jender, pembebasan hak-hak sipil dan gerakan perdamaian harus dirangkul, sehingga menjadi kekuatan besar perlawanan. Pembangunan aliansi dari berbagai kekuatan sosial sangatlah diperlukan, strategi penyatuan gerakan seperti inilah yang selanjutnya disebut Gramsci sebagai perang posisi (*war of position*). Apabila kaum Borjus internasional menggunakan strategi "revolusi pasif", melalui agen-agen negara dan kekuatan pembentuk struktur sosial melalui perundang-undangan dan hukum tanpa melibatkan partisipasi rakyat, maka pergerakan *counter-hegemoni*, menggunakan "revolusi anti-pasif (*anti-passive Revolution*)". Ada beberapa fase yang harus dilalui untuk memperoleh posisi hegemonik menurut Gramsci. Fase pertama, yang paling mendasar adalah dibentuknya serikat dagang untuk melindungi kepentingan dan kesetaraan berbagai lapisan masyarakat. Fase kedua, terjadi ketika tumbuhnya kesadaran bersama dari semua anggota atas pentingnya pemenuhan tuntutan

---

<sup>14</sup>Simon, Roger, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Insist dan Pustaka Pelajar, hal. 23 (dikutip dari catatan-catatan Gramsci waktu dipenjara-SPW II 443)

<sup>15</sup>Ibid, hal. 24

bersama dalam bentuk persamaan hukum dan politik. Fase ketiga, adalah fase hegemonik, dimana penentangan terhadap kaum kapitalis mulai dilakukan.<sup>16</sup>

Apabila dikontekaskan dengan perjuangan FSD melawan kaum borjuis internasional, maka gambaran pola gerakan diatas dapat terlihat setelah penyelenggaraan FSD ke IV di Mumbai, India. Kesadaran akan perlunya manuver pergerakan dengan membangun aliansi besar anti-kapitalisme global, dilakukan melalui perluasan isu dan pembahasan FSD pada isu-isu lain yang juga memperjuangkan keadilan global. Strategi pemanfaatan media sebagai media perlawanan, merupakan alternatif pergerakan disamping pengerahan massa rakyat melalui demonstrasi. Susan George, seorang rujukan kondang dari Inggris, mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir ini forum-forum sosial telah berhasil mengubah lanskap politik dunia<sup>17</sup>.

### **1. Perdebatan Forum Sosial Dunia**

Meski secara umum semangat anti-korporasi, anti-neoliberalisme, dan anti-imperialisme semakin marak seiring dengan perkembangan FSD, namun opini dalam FSD sendiri beragam. Inilah keunggulan sekaligus kelemahan FSD.

Representasi masyarakat dunia yang semakin luas, baik isu maupun opini menimbulkan polemik tersendiri gerakan antineoliberalisme, pro dan

---

<sup>16</sup> Ibid, hal 36

<sup>17</sup> jakarta.indymedia.org/newswire.php?story\_id=96 - 35k (The Guardian, 15/10/040)

kontra juga mewarnai perkembangan FSD. Kurangnya kesempatan berdebat lebih dan ragam isu yang dibawa masing-masing peserta menyebabkan forum ini kesulitan menetapkan fokus isu dan aksi politik hal ini telah disadari sejak awal pendirian forum.

Pada pelaksanaan FSD II, beberapa kekuatan konservatif dalam FSD berusaha membangun dialog antara FSD dan FED. Dialog ini dilakukan dengan harapan mengembalikan FED pada kesadaran filantropisnya atas keadilan bersama. Bagi mereka forum dialog ini dimungkinkan terjadi mengingat kedua forum ini dianggap mewakili *civil society*. Orang kaya, pemilik modal, serta jutaan massa miskin sama-sama merupakan stakeholder atas dunia. Sementara disisi lain LSM radikal dan organisasi berbasis massa luas menyerukan mobilisasi rakyat melawan neoliberalisme.<sup>18</sup>

Wajah buruk neoliberalisme, Konsensus Washington. Baik konsensus yang "asli"; privatisasi, deregulasi, liberalisasi, disiplin fiskal, dan pengagungan HAKI, atau konsensus *augmented* ; pasar kerja dan upah lentur, *corporate governance*, kesepakatan WTO, Bank Sentral "independen". Senantiasa mengundang perhatian peserta FSD. Akibatnya seringkali tawaran alternatif bagi sistem dunia hanya menjadi perdebatan penutup. Tradisi ini mengundang kritik terhadap FSD baik internal maupun dari luar seperti halnya *Mumbai Resistance* yang mengkritik aspek politik FSD, *Mumbai Resistance* sebuah formasi yang berposisi terhadap Forum Sosial Dunia.

---

<sup>18</sup> Ibid

Seperti kata MR, Forum Sosial Dunia tidak cukup tegas dalam penentangannya terhadap kapitalisme, karena dalam sejarahnya Forum Sosial Dunia telah menerima dana dari berbagai lembaga dan yayasan yang diragukan ketulusannya.

Piagam Prinsip Forum Sosial Dunia (FSD) menyebutkan bahwa FSD adalah tempat pertemuan terbuka untuk pemikiran reflektif, perdebatan demokratis atas berbagai ide, rumusan proposal dan pertukaran bebas atas pengalaman dan pembangunan jaringan untuk aksi-aksi yang efektif, oleh kelompok dan gerakan masyarakat sipil yang berlawanan terhadap neo-liberal dan dominasi dunia oleh modal dan segala jenis imperialisme dan berkomitmen untuk membangun sebuah masyarakat dunia yang ditujukan pada hubungan yang penuh manfaat antar umat manusia dan antara manusia dengan bumi.

Forum Sosial Dunia hanya memiliki mandat menyatukan dan membangun jaringan dari organisasi dan gerakan masyarakat sipil dari semua negeri di seluruh dunia, namun tidak berniat menjadi sebuah badan yang mewakili masyarakat sipil dunia. Sebagai sebuah tempat pertemuan, ia terbuka untuk pluralisme dan keragaman aktivitas dan cara keterlibatan organisasi dan gerakan memutuskan terlibat di dalamnya, disamping keragaman gender, ras, etnik dan budaya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup><http://ccc.1asphost.com/asdfghjklmnbvcxz/weareundercontrol/yesweare/topic.asp?>

Pada akhirnya sebagai sebuah konteks bagi pembangunan jaringan, FSD berusaha menguatkan dan menciptakan rantai nasional dan internasional baru antar organisasi dan gerakan masyarakat sipil yang akan meningkatkan kemampuan untuk perlawanan sosial terhadap proses dehumanisasi yang sedang menimpa dunia dan memperkuat langkah-langkah perbaikan martabat manusia yang sedang diambil oleh aksi-aksi dari gerakan dan organisasi. FSD adalah sebuah proses yang mendorong organisasi dan gerakan yang tergabung di dalamnya untuk menempatkan aksi-aksi mereka sebagai bagian dari masyarakat dunia, dan untuk memasukkan ke dalam agenda global praktek-praktek perubahan yang kini sedang mereka coba dalam rangka membangun sebuah dunia baru.

Evaluasi terhadap kemajuan FSD tersebut diatas, mendorong tokoh-tokoh FSD mengadakan beberapa rekonstruksi strategi pergerakan yang secara mendalam akan dikupas pada bagian berikutnya.

## **2. Forum Sosial Regional**

Penyadaran global bagi sebuah perlawanan membutuhkan jaringan organisasi yang kuat pada tingkatan lokal, khususnya bagi belahan dunia yang belum terjangkau gaung FSD. Kesadaran tersebut mendorong aktivis FSD mengeluarkan keputusan bersama membentuk dewan *International Council/ IC* untuk mendorong keberhasilan internasionalisasi forum. IC

---

bertanggungjawab secara umum pada penguatan jaringan internasional tersebut, diantaranya melalui pembentukan FSR (Forum Sosial Regional).

Tahun 2002 ditandai dengan pendalaman dan pelebaran FSD. Berbagai kawasan mengadakan forum-forum yang serupa dengan Porto Alegre. Forum Sosial regional merupakan inovasi penguatan basis forum dalam konteks kelokalan masing-masing kawasan. Tujuan Forum sosial regional adalah penguatan isu-isu ketimpangan pada masing-masing kawasan, terutama bagi kantong-kantong perjuangan antineoliberalisme.

Signifikansi peran FSD ditentukan sangat oleh keberadaan forum-forum pada tingkatan lokal dan perwakilan masing-masing negara. Hingga saat ini forum-forum regional dan tematis dan sejumlah besar forum sosial tingkat nasional telah diselenggarakan dengan tingkat keberhasilan yang berbeda. Forum Argentina, sebagai wadah pencarian alternatif bagi krisis kebijakan neoliberal. Forum tematis tentang palestina, forum regional Asia di Hiyderabad, forum regional Afrika (di Adis Ababa), dan forum regional Eropa (Florence), selain itu forum lokal dan nasional telah belipat ganda diluar perkiraan sebelumnya.

ESF (*Eropean Sosial Forum*), diselenggarakan di Florence, Italia, pada tanggal 6-9 November 2002. ESF dihadiri oleh 40 ribu orang, lebih dari tiga kali lipat dari yang dipikirkan. ESF telah mensponsori long march 1 juta orang pada tanggal 9 November, menentang rencana penyerbuan AS ke Irak. ASF juga merupakan manifetasi dari penguatan basis FSD di tingkat regional

Asia. Forum yang dilaksanakan di kota Hyderabad, India, sejak tanggal 2 sampai tanggal 7 januari 2002 , dihadiri oleh 14400 peserta baik dari tuan rumah maupun dari 41 negara lain. ASF telah menyuarakan Hak Asasi Manusia, yakni hak melawan kekerasan dan melawan imperialisme.

### **3. Fair Trade : Alternatif Perdagangan berkeadilan**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep *fair trade* adalah konsep alternatif bagi perdagangan dunia yang berkeadilan, dasar pemikiran dari *fair trade* bertumpu pada *advantages* dan *fairness*, yakni perolehan keuntungan yang tidak menafikan prinsip keadilan dan nilai etis. Kedua konsep inilah yang kemudian menginspirasi gerakan perdagangan alternatif selanjutnya.

Gerakan *fair trade* sesungguhnya muncul sejak kurang lebih empat puluh tahun lalu, tepatnya ketika gerakan pembelaan rakyat miskin mulai dikenalkan oleh organisasi non pemerintah seperti Oxfam GB (Inggris), Trans Fair (Jerman), Fair Trade (AS) dan beberapa organisasi lain didirikan. Populernya gerakan Fair Trade dikalangan organisasi tersebut, disebabkan keprihatinan terhadap sistem perdagangan internasional yang tidak adil, dimana terjadi eksploitasi terhadap negara-negara selatan oleh negara utara. Pada awalnya gagasan ini hanya melingkupi skala nasional, namun perkembangan kampanye *fair trade* yang melampaui batas-batas negara menyebabkan, gerakan ini berangsur-angsur meluas menjadi lintas batas negara dan regional. Hingga tahun 1990an Michel Barrat Brown memperkirakan volume

perdagangan dunia melalui jalur fair trade mencapai angka US\$ 50 juta per tahun, sementara volume perdagangan konvensional diperkirakan melebihi 50 milyar pertahunnya<sup>20</sup>.

Kecilnya volume perdagangan *fair trade* disebabkan oleh terbatasnya ruang gerak *fair trade* yang membatasi pada pembelian barang komoditas primer, kerajinan dengan target utama petani dan nelayan, keterbatasan kampanye *fair trade* dan minimnya dukungan pemerintah, juga merupakan penyebab rendahnya volume perdagangan berkeadilan. Disamping itu pembatasan isu *fair trade* pada pengurangan *Trade Exploitation*, maka perkembangan *fair trade* selanjutnya adalah memperluas isu pada hak asasi manusia, gender, dan masalah perburuhan. Pada prinsipnya implementasi *fair trade* memerlukan dukungan dari aktor-aktor. *Pertama*, pemerintah atau negara di utara maupun selatan. Aktor negara dipilih berdasarkan pertimbangan, peran negara dalam perancangan ekonomi politik internasional sebagai representasi kepentingan nasional dan regionalnya. *kedua*, Organisasi internasional baik di utara maupun selatan dan, ketiga elemen masyarakat baik di utara maupun selatan.

Berkaitan dengan mekanisme *fair trade*, David Ransom<sup>21</sup> menawarkan tiga model *fair trade*. *Pertama*, praktek *fair trade* yang dikaitkan dengan

---

<sup>20</sup> Adiwinata, Bob, B, Pakpahan, K, Aknolt, *Fair Trade-Gerakan Perdagangan Alternatif*, Pustaka Pelajar, Oxfam, Pacis Bandung, Cetakan I. Juli 2004, hal 57

<sup>21</sup> Ibid, hal.58

upaya untuk memperpendek jarak antara produsen di negara berkembang dengan konsumen dinegara-negara maju pada sektor primar dan kerajinan. Perdagangan ini juga disebut dengan “perdagangan berkemanusiaan”, jalur ini juga dimaksudkan untuk menghindari banyaknya peran perantara berupa tengkulak yang merugikan petani, serta membuka akses perdagangan internasional bagi mereka. Kedua, *fair trade* yang mencoba menerobos jalur perdagangan ortodox yang dianggap terlalu menguntungkan para pemodal besar dan merugikan pemodal kecil. Melalui pembelian produk olahan dari negara berkembang, untuk disalurkan di supermarket khusus di negara-negara maju. Ketiga, *fair trade* yang mencoba meminimalisir bahkan menghapuskan tindakan-tindakan yang dirasakan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan keseimbangan ekologi. Model lain yang juga mulai dikembangkan berkaitan dengan prinsip *fair trade*, adalah pemberlakuan kerjasama perdagangan selatan-selatan yang mulai digalakkan sejak tahun 1990an.

Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, bahwa prinsip utama *fair trade* adalah menempatkan posisi negara maju dan negara berkembang dalam posisi yang setara. Tujuannya adalah menetapkan hubungan yang langsung antara kelompok produsen dan konsumen, dimana konsumen mendapatkan akses dan jaminan kualitas dari produsen secara langsung melalui informasi yang transparan.

Organisasi perdagangan berkeadilan seperti Oxfam dan TWIN berperan sebagai distributor, untuk menyalurkan barang-barang dari negara-negara

dunia ketiga ke negara-negara maju melalui ATO's (*Alternatives Trade Organizations*). Pada tahun 1948 ATO's membentuk IFAT (*International Federation of Alternative Trade*) yang bermarkas di Amsterdam, melalui forum ini, pertukaran informasi dan koordinasi perdagangan dilakukan guna mendukung penyebaran dan kampanye *fair trade*.

Dalam pembahasan FSD perdagangan alternatif menjadi salah satu tawaran bagi pembentukan sistem baru yang berkeadilan Tujuan alternatif globalisasi yang ditawarkan dalam FSD adalah pertumbuhan ekonomi yang terukur, memaksimalkan kesempatan yang sama dan kesetaraan, memberi pilihan yang demokratis kepada setiap orang, serta membuka ruang bagi publik untuk mengontrol jalannya ekonomi," demikian Walden Bello berkomentar dalam FSD Mumbai.

Dewasa ini jenis perdagangan alternatif telah dikampanyekan keseluruh dunia, dalam setiap agenda pembahasan FSD pemasifan isu *fair trade* dilakukan melalui propaganda media masa dan pemberian informasi *fair trade* pada setiap anggota FSD yang hadir.

### **3. "Perang Posisi" dan Gelombang baru perlawanan.**

Perang posisi dalam konsepsi Gramscian adalah strategi membangun suatu kelompok besar yang terdiri dari berbagai kekuatan sosial yang disatukan oleh konsepsi yang sama tentang dunia.<sup>22</sup> Kekuasaan hegemoni

---

<sup>22</sup> Simon, Roger, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, Insist, Pustaka Pelajar, hal. 25

kaum borjuis harus terus diperlemah dengan kekuatan balik dari gerakan-gerakan sosial yang berasal dari aktivitas anggota gerakan tersebut.

Tugas praktisi masyarakat sipil untuk keadilan sosial adalah terlibat aktif dalam penentangan setiap usaha rezim perdagangan bebas dan globalisasi yang berusaha melakukan penetrasi ke pedalaman area masyarakat. Penetrasi yang bersifat memaksa, struktural dan berwatak otoriter dari rezim ini yang mempengaruhi semua kebijakan ekonomi, politik, serta memudahkan laju invasi global kapital dan investasi, invasi globalisasi proses produksi serta globalisasi pasar. Penghancuran hak hidup itu berwujud perebutan sumber-sumber alam dan keanekaragaman hayati, hak-hak dan *entitlement* rakyat lokal yang semestinya dihormati.<sup>23</sup>

Seperti ditegaskan Noam Comscy tentang watak FSD pada pelaksanaan FSD IV Mumbay, India, bahwa FSD hanyalah bagian dari proses panjang gerakan penyadaran global. Yang diharapkan bisa dimulai dari tingkat individu, untuk menolak hegemoni, gagasan, pemikiran, gaya hidup, dan kebudayaan. Yakni penyadaran akan keberagaman, kesetaraan, keadilan, perdamaian dalam arti luas, serta penolakan terhadap tindakan-tindakan kekerasan.<sup>24</sup> Bertindak lokal berarti berani menolak produk dan jasa dari korporasi internasional, terutama yang bermasalah, menjadi kreatif dan produktif, serta membangun perekonomian komunitas yang efektif dan

---

<sup>23</sup> <http://mkb.kerjabudaya.org/>; ©2003, Media Kerja budaya Online/

<sup>24</sup> *Bukan Sekedar Anti Globalisasi*, hal. 121

berkelanjutan. Agar tindakan lokal makin luas dampaknya, diperlukan penguatan dengan tindakan global yang berarti membuat lobi, membangun jaringan, dan melakukan berbagai moratorium dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional yang tidak adil dan berbasis keuntungan semata.

Jefrey Sachs mengatakan, semua yang ada di FSD IV Mumbay saat ini disatukan oleh aspirasi untuk mendapat keadilan yang lebih besar bagi semua pihak dan tidak ada lagi yang termarjinalkan. Namun, Monbiot mengingatkan bahwa FSD memang fantastis karena di sinilah semua orang bertemu, berkumpul, dan saling menguatkan energi untuk membangun gerakan sosial di tempat masing-masing. "Meski demikian, itu saja tidak cukup. Dibutuhkan lebih banyak lagi upaya agar mereka yang tidak bisa ikut ke sini juga didengar suaranya dan ikut bertindak global, tidak hanya lokal".

Fenomena *counter-hegemoni* masyarakat sipil terhadap hegemoni globalisme, tidak hanya menjadi fenomena politik lokal, namun gerakan perlawanan tersebut kini semakin mendunia. Bukan hanya gerakan subaltern yang terbatas isu, ruang dan waktu, tanpa strategi dan arah yang jelas. Namun kekuatan tersebut berkembang menjadi ancaman bagi para diktator neoliberal, kemungkinan pengambilalihan sistem atau gerakan reformasi global oleh masyarakat sipil tidak hanya menjadi mimpi, namun akan segera terjadi.

Keberadaan FSD bagi pergerakan globalisasi alternatif, memiliki fungsi yakni, pertama, menyediakan ruang baik fisik maupun temporal bagi

beragam gerakan untuk bertemu, berjaringan dan meneguhkan keberadaan perlawanan tersebut. Kedua sebagai ruang *retreat*, dimana berbagai gerakan ini menumpulkan kembali energinya dan memetakan arah dari daya berkesinambungan untuk mengkonfrontasikan dan membalik proses serta institusi serta struktur-struktur kapitalisme global. Ketiga, Wadah bagi pergerakan sosial untuk mengelaborasi, mendiskusikan, dan mendebatkan visi, nilai, dan institusi untuk alternatif tata dunia.

Sebagai mana yang dikemukakan Gramscian bahwa bahaya krisis hegemoni kediktatoran penguasa neoliberal adalah berkembangnya gerakan counter hegemoni tersebut menjadi gelombang besar kekuatan masyarakat yang akan menghadang mereka. Krisis ini menjadi berbahaya ketika dalam waktu singkat, semua strata bergerak cepat mengorganisasikan dirinya dalam ritme perlawanan yang sama. Hal ini menunjukkan peleburan dari seluruh kelas sosial dibawah satu kepemimpinan, yang dipercaya dapat memecahkan segala permasalahan dan menghindarkannya dari ancaman bahaya.<sup>25</sup> "Satu-satunya yang pantas menjadi global adalah perlawanan," demikian pengarang Arundhati Roy dari India, menyambut gerakan anti-globalisasi yang semakin meluas. Hampir setiap pertemuan pemimpin bisnis, kepala negara dan lembaga keuangan internasional dihadang oleh kelompok masyarakat yang

---

<sup>25</sup> Gramsci, Antonio, *Catatan-Catatan Politik Gramsci*, diterjemahkan dari *Selection From The Prison Note Books Of Antonio Gramsci*; Oleh, Raiza Wahyudi, Gafna, Ira Puspitorini, B. Febrianto. Tri Sukma Retnoningrum, Cetakan Pertama; Juni 2001

bergabung dengan aktivis dari seluruh penjuru dunia. Pada November 1999 di Seattle, sekitar 30.000 aktivis bergabung dalam aksi protes besar menentang pertemuan WTO. Dari kampanye di media massa dan demonstrasi yang kecil dan sporadis, gerakan anti-globalisasi mulai menerapkan taktik baru: menghalangi jalannya pertemuan internasional yang mereka dakwa akan semakin menyengsarakan dunia.<sup>26</sup> Susan George, seorang rujukan kondang dari Inggris, mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir ini forum-forum sosial telah berhasil mengubah lanskap politik dunia (The Guardian, 15/10/04).

Sekitar 2.000 pengunjung rasa yang berencana membantuk rantai manusia mengelilingi kota Endinburgh, Skotlandia, pada pertemuan negara-negara anggota G.8 pada 6 sampai 7 juli 2005. Protes yang bertajuk “Make Poverty History” melibatkan hampir semua elemen masyarakat. Hal ini menunjukkan format baru pergerakan Counter Hegemoni Globalisme, memperingatkan negara-negara G8 atas kemiskinan yang tengah terjadi. Mobilisasi massa serupa juga terjadi pada pertemuan-pertemuan lembaga internasional lainnya, disamping aksi-aksi lokal yang menentang agenda Neoliberalisme pada berbagai negara. Di Indonesia, kebijakan privatisasi dan penghapusan subsidi BBM telah membangkitkan demonstrasi penolakan di berbagai kota. Pengerahan massa penolakan terhadap aksi militer AS ke Irak

---

<sup>26</sup> <http://mkb.kerjabudaya.org>